

Kiai Pondok dan Cukong Rokok: Sebuah Pergeseran Identitas Agama dalam Masyarakat Modern di Kediri

Suhadi¹

1. Pengantar

Kalau Geertz telah mengajak Anda bertamasya ke Pare, sebuah wilayah di ujung timur laut Kediri, tulisan singkat ini ingin mengajak Anda bertamasya sebentar ke jantung kota itu. Untuk mendengar cerita tentang bagaimana pergeseran identitas agama dalam masyarakat modern berlangsung. Tapi sebaiknya kita jalan-jalan dulu lebih bebas. Kalau Anda berjalan ke bagian tengah kota, kecamatan Kota, Anda akan menemukan bangunan-bangunan yang menunjukkan kompleksitas peran sosial masyarakat yang hidup di dalamnya. Di sini terdapat pusat kantor pemerintahan kota, dewan legislatif, kantor publik, dan lain sebagainya. Selanjutnya Anda akan mendapatkan Gudang Garam sebagai raksasa ekonomi lokal yang sangat menentukan; kampus STAIN sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri yang meski belum maju tapi mulai berkembang; makam Syaikh Wasih sebagai pusat spiritualitas dan mistik kaum santri; toko-toko yang banyak didominasi kaum Cina di Jl. Dhoho dan Jl. Patimura; Semampir, sebuah pusat prostitusi yang dulu dilegalkan dan sejak tahun 1999 secara resmi ditutup, tapi pada kenyataannya tetap aktif hingga kini²; dan tidak kelewatan di sini Anda akan menemukan dua kantor koran lokal, *Radar Kediri* dan *Memorandum Kediri*. Radar Kediri yang berafiliasi ke Jawa Pos Group mulai terbit tahun 1999 dan menandai arus desentralisasi informasi yang sangat kuat di era Reformasi.

Sementara apabila Anda datang ke bagian barat, kecamatan Mojojoto, Anda akan menemui sesuatu yang tidak se-kompleks apa yang ada di bagian tengah kota, tapi di sini terdapat jejak geografis pengelompokan peran sosial yang menarik Anda amati. Di bagian tengah sampai ke timur terdapat pusat pondok pesantren besar seperti Pesantren Lirboyo, Pesantren Kedonglo dan Pesantren Bandar Kidul. Sebaliknya di sebelah barat-laut terdapat situs-situs yang “bukan santri” dimana apabila kita tarik garis imajiner huruf “L” terdapat rangkaian gunung Klotok--goa Selomangleng--museum Erlangga--pura Sekartaji--gunung Maskumambang. Klotok dan Selomangleng masih menjadi tempat praktik tradisi mistik *kejawen* yang kuat. Pura Sekartaji menjadi simbol masih berlangsungnya agama Hindu dengan baik meskipun tidak terlalu menggairahkan. Didukung di sebelah baratnya terdapat museum sejarah, museum Erlangga, yang mengingatkan masa kejayaan kekuasaan Hindu di Kediri pada abad 11. Dan di bagian utara terdapat Pabrik Gula (PG) Meritjan yang didirikan oleh *Nationale Industrie en Landbouw Mij NV* pada tahun 1903 dan pada tahun 1960-an wilayah ini antara lain menjadi basis gerakan komunis.

Sedangkan di wilayah timur, kecamatan Pesantren, kurang ada hal penting yang bisa Anda temui. Kecuali mungkin di sini terdapat perusahaan gula terbesar di Kediri, PG Pesantren Baru yang didirikan oleh *NV Javasche Cultuur Mij* pada tahun 1912. Pabrik gula ini mampu menggiling 821.453,2 ton tebu pada tahun 2002, sedangkan PG Meritjan di kecamatan Mojojoto hanya 308.889,6 ton.³ Selain itu yang mungkin

¹ Suhadi adalah Peneliti di Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, UGM, Yogyakarta. Menulis thesis di program yang sama mengenai *Relation and Role of Two Local Strategic Elites in Initiating Local Peace (Study of the Lirboyo Pesantren and the Gudang Garam Factory in Kediri Municipality)*.

² *Radar Kediri*, 4 Pebruari 2004.

³ “Kota Kediri dalam Angka 2002”.



paling penting disebut adalah mulai tahun 1972 di Burengan berdiri pesantren yang secara ideologis lebih “tertutup” dan terus berkembang pesat dimana Kediri menjadi pusat gerakan nasionalnya. Nama lembaga ini berganti-ganti, pernah bernama Lemkari dan sekarang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

Perkembangan dan hubungan Gudang Garam di wilayah tengah kota dengan pesantren Lirboyo di sebelah barat kota menandai pergeseran sosial penting dari apa yang telah terekam dalam studi Clifford Geertz (1960, 1965, 1965) maupun Hermawan Sulisty (2003). Baik Geertz maupun Sulisty, keduanya menempatkan kaum santri sebagai aktor terpenting dalam studi-studinya. Di sini kita melanjutkan apa yang telah dimulai oleh keduanya dan mencoba melihat pergeseran apa yang sedang terjadi.

2. Arah Perubahan Peran Sosial

Penulis lahir dan dibesarkan di sebuah lingkungan santri “tradisional” yang kuat. Tak jarang penulis dan teman-teman sebaya penulis mendengar cerita *hero* yang terus diulang dari para pelaku kekerasan yang merasa “memenangkan” kekerasan massal sepanjang tahun 1965-1966. Lirboyo, sebuah pesantren yang didirikan oleh kiai Abdul Karim tahun 1910, menjadi penggerak utama kekerasan ini. Korban pertama yang meninggal tanggal 5 Oktober 1965 dalam peristiwa itu jatuh ditangan kelompok santri dari pesantren ini.⁴ Kiai, alumni dan santri Lirboyo bersama militer memperagakan pembantaian massal yang sangat dahsyat di empat bulan terakhir tahun 1965 dan delapan bulan pertama tahun 1966 dengan gerakan yang lebih sporadis.

Ceritanya sangat berlainan, apa yang diperagakan oleh Lirboyo tiga puluh tahun kemudian. Pada awal Agustus 1996 pemerintah sudah mulai mengeluarkan sinyalemen yang membabi-butakan bahwa PKI berada di balik kerusuhan Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996, di kantor PDI Jakarta.⁵ Pemerintah dan militer merasa akan menghadapi sebuah tantangan yang besar sekali. Sehingga perlu meminjam pengaruh tokoh agama. Abdurrahman Wahid melihat NU akan dimanfaatkan kembali oleh rezim Soeharto dalam isu komunisme ini. Oleh karena itu PBNU pada 1 Agustus 1996 mengeluarkan seruan agar “warga NU hendaknya ikut menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama”. Dibalik seruan yang “datar” ini Gus Dur mengingatkan supaya warga NU tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan destruktif. Ia meminta agar warga NU berkoordinasi dengan pengurus PBNU, Badan Otonom di bawah NU, atau lembaga NU yang ada di atasnya.⁶

Pemerintah dan militer sejak awal mulai mewacanakan PRD (Partai Rakyat Demokratik) berada di belakang kerusuhan 27 Juli. Dalam temu alumni pesantren Gontor di Gedung Granada Jakarta, Kasad R. Hartono, mengajak umat Islam untuk waspada dengan keberadaan PRD.⁷ Pemerintah mulai mengidentifikasi bahwa PRD adalah metamorfosa dari PKI yang membalik gerakan “Desa mengepung Kota”-nya PKI menjadi “Kota mengepung Desa”.⁸ Nasution, tanggal 4 Agustus juga angkat bicara dengan menjelaskan tiga taktik komunisme-leninisme: infiltrasi-subversi, perlawanan terbuka, dan perang saudara.⁹

Di Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Imam Utomo, dengan cepat merespons masalah ini. Pada tanggal 4 Agustus 1996 dia mengungkapkan bahwa TNI sedang mengejar aktivis PRD dan SMID

⁴ Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu Sebuah Pembantaian Massal yang Terlupakan*, cet. ketiga, Jakarta: Gramedia, 2003, 163.

⁵ *Jawa Pos*, 2 Agustus 1996. Pernyataan dibuat antara lain oleh Rudini.

⁶ *Ibid.* Seruan resmi PBNU ini ditandatangani oleh Abdurrahman Wahid (Ketua PBNU), Ma'ruf Amin (Rais Syuriah PBNU), dan Said Agil Siradj (Katib PBNU).

⁷ *Ibid.*

⁸ *Jawa Pos*, 3 Agustus 1996

⁹ *Jawa Pos*, 5 Agustus 1996.



yang menyebar di Surabaya, Jombang dan Kediri. Mereka merupakan para aktivis yang memelopori demonstrasi-demonstrasi buruh di Jawa Timur, seperti di Wedoro Anom, Blauran, Maska Jombang, Kediri, dan lain-lain.¹⁰ Sampai akhir Agustus para aktivis PRD dan SMID banyak ditangkap di Surabaya, Gresik, Nganjuk, dan Blitar. Sementara sampai akhir bulan Agustus 1996 tidak ada informasi penangkapan aktivis di Kediri.¹¹ Tidak bisa dijelaskan secara pasti apakah sebenarnya sinyalemen Pangdam V Brawijaya tentang penyebaran aktivis PRD dan SMID sampai ke Kediri yang tidak tepat atau aparat tidak bisa menangkap aktivis-aktivis PRD dan SMID di Kediri.

Rupa-rupanya di Jawa Timur pada awalnya kiai-kiai NU tidak bisa menolak ajakan untuk tidak mengkonsolidasikan diri dalam keputusan politik penguasa dan militer dalam isu komunisme ini. Kiai Imron Hamzah (Rais Syuriyah PWNU Jatim) dan kiai Wahid Zaini (pengasuh Pesantren Nurul Jadid, Paiton) mengikuti “Apel Merah Putih” di Surabaya yang mengeluarkan statemen kebulatan tekad memberantas perusuh dan menumpas komunisme seperti PRD, SMID dan LSM-LSM berpaham komunis.¹² Meskipun ketua PBNU, Gus Dur, ingin agar kiai-kiai NU tidak masuk dalam bingkai kepentingan penguasa dalam isu ini, tapi sepertinya kiai-kiai masih sulit mengambil jarak dengan isu komunisme yang sangat dekat dengan masa lalu mereka.

Sementara di Jombang dan Kediri saat itu masih ada beberapa tokoh yang memprakarsai konfrontasi fisik dengan PKI tahun 1965-1966, seperti kiai Yusuf Hasim (Tebuireng) dan kiai Maksum Jauhari (Lirboyo). Kediri, tempat konfrontasi fisik paling hebat pembunuhan massal 1965-1966, dipilih sebagai ikon kebangkitan anti komunisme di Jawa Timur. Peringatan kelahiran Banser secara nasional tahun itu akan diperingati secara besar-besaran di Kediri. Sampai di sini kita bisa menguji apakah isu ini akan berkembang menjadi konflik dan kekerasan massa. Di sisi lain para simpatisan PDI pro-Megawati saat itu juga telah berkembang luas di Kediri. Pada Pemilu 1997 mereka memboikot dengan tidak pergi ke TPS dan malah pergi ke Blitar secara bersama-sama.¹³ Sementara itu sikap superioritas kaum santri atas kaum abangan masih terpelihara terus dan sangat kuat di kalangan para kiai.¹⁴ Tetapi sepertinya dalam rentang lebih dari tiga puluh tahun sejak konflik 1965-1966 terdapat pergeseran pilihan politik kiai yang penting.

Peringatan kelahiran Banser dengan acara utama “Apel Akbar Banser” diselenggarakan di stadion Brawijaya, Kediri, tanggal 31 Agustus 1996 dengan inspektur upacara Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Imam Utomo. Rupa-rupanya Kediri telah diincar menjadi ikon anti-komunisme di saat-saat yang tidak menentu tersebut. Menurut catatan panitia upacara ini diikuti oleh sekitar 10 ribu anggota Banser. Agenda simbolik yang utama dari apel akbar ini adalah “ikrar kesetiaan kepada NU dan NKRI”.¹⁵ Dalam kondisi awal pergolakan reformasi, Apel Akbar Banser nasional di Kediri ini menjadi tanda masih terseraknya dan ketidakpastian ke mana arah politik kiai di banyak tempat, termasuk di Kediri. Tetapi dengan berlangsungnya Apel Banser tersebut sebenarnya para kiai telah membuat pilihan awal yang sangat membahayakan. Sebab bagi penguasa dan militer mereka kemudian mudah dibenturkan dengan kelompok yang dicap kiri, PRD, atau siapapun yang berani menentang pemerintah.

Ketika upacara atau apel berlangsung di Brawijaya, sekitar 7 ribu santri Lirboyo bersama kiai-kiai di Kediri dan sekitarnya menyelenggarakan *istiqhasah* di pesantren Lirboyo yang dipimpin K.H. Imam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jawa Pos, 7, 11, dan 13 Agustus 1996.

¹² Jawa Pos, 6 Agustus 1996. Apel Merah Putih ini dihadiri pula oleh Gubernur Jatim Basofi Sudirman, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Muchdi, dan Ketua MUI K.H. Misbach.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sukawit, Ketua PDIP, Agustus 2003.

¹⁴ Wawancara dengan Kiai Idris Marzuqi, Juli 2003. Kiai Idris mengungkapkan kekecewaannya kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Dewan Shura PKB, yang telah mengucapkan kata-kata bahwa “mencoblos PDIP sama saja dengan mencoblos PKB”. Hal demikian membuat sulit kiai-kiai lokal untuk memaksimalkan polarisasi dan politisasi ideologis bahwa PKB adalah partainya kaum santri dan PDIP adalah partainya kaum abangan.

¹⁵ Jawa Pos, 31 Agustus 1996.



Syuhrowardi dari Blitar. Setelah upacara, para Banser melakukan kirab jalan kaki ke Lirboyo yang berjarak lebih dari 3 km dengan mengumandangkan *shalawat badar*. Di pesantren tersebut mereka menjadi satu dengan ribuan santri yang telah usai *istighasah* untuk mendengarkan ceramah kiai Maksum Jauhari (alm.) yang berceramah tentang konfrontasi fisik 1965-1966, tentu dalam versi kaum santri. Di sini juga diluncurkan sebuah buku tentang "jihad" Banser melawan PKI tahun 1965 yang ditulis oleh Agus Sunyoto. Sejak 30 Agustus sampai 2 September 1996 Jawa Pos secara berturut-turut memuat artikel Agus Sunyoto, Ketua LKP-GP Ansor Jawa Timur, dengan judul yang sangat heroik, seperti "Mengenang Jihad Banser 1965: Konsolidasi Kekuatan PKI Pasca 1948".¹⁶ Koran ini memang beberapa hari menulis secara panjang lebar tentang peran sosial politik Banser di masa lalu.

Dalam situasi ketegangan sosial yang mulai mengkhawatirkan, isu komunisme diintrodusir kembali di Kediri. Kirab Banser dari stadion Brawijaya ke Lirboyo dengan memekikkan *shalawat badar* mengingatkan kembali konfrontasi kaum santri dengan kelompok komunis di masa lalu. *Shalawat badar*, sebuah lagu gubahan Ali Mansyur dalam sejarah pergerakan NU bermakna "membangkitkan sikap heroisme yang secara psikologis mendasari bahwa tindak kekerasan dimaknai sebagai tindakan jihad".¹⁷

Sementara itu sebenarnya saat itu reimaginasi komunisme sebagai musuh bersama tidak lagi memiliki personifikasi yang jelas atau semakin kabur. Mungkin kenyataan ini menjadi penting sekali mengapa reproduksi isu komunisme tidak berlanjut kembali setelah sebuah kekerasan yang kemudian bergeser menjadi konflik dan kekerasan antar agama pertama terjadi di Situbondo, sebuah kabupaten kira-kira 250 km di timur Kediri. Peristiwa yang terjadi sekitar enam minggu setelah apel Banser tersebut memberikan pelajaran berharga kepada elit-elit kaum santri di Kediri apakah memilih mengintrodusir konflik dan kekerasan di Kediri atau sebaliknya, mempersiapkan konsolidasi agar kasus yang sama tidak terjadi di Kediri. Rupa-rupanya pilihan kedua ini menjadi pilihan elit-elit lokal di Kediri.

Melihat intensitas konflik yang semakin menguat pada pertengahan 1998 di Kediri mulai diperbincangkan pelebagaan konsolidasi para elit lokal untuk mengelola platform bersama perdamaian yang telah dimulai secara informal antar para elit lokal sebelumnya. Pada tanggal 10 Mei 1998 diadakan pertemuan pertama di rumah kiai Anwar Iskandar. Pertemuan di pesantren Assa'adiyah ini dihadiri oleh kiai Anwar Iskandar (alumni Lirboyo, pengasuh pesantren Assa'adiyah), kiai Imam Yahya Malik (Pesantren Al-Ma'ruf Kedonglo), Budi Dharma (tokoh Cina-Kristen), Amin Djunaidi (pengusaha), Abdul Halim Mustafa (PCNU Kota), Ahmad Subakir (PCNU Kota), dan Solahuddin (aktivis).¹⁸ Pertemuan tersebut kemudian melahirkan pelebagaan sebuah paguyuban, PKUB-PK (Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama-Penghayat Kepercayaan), yang sangat penting untuk masa depan perdamaian di Kediri.

Kegiatan pertama Paguyuban ini, doa bersama antarumat beragama, diselenggarakan pada 28 Juli 1998 di kampus Uniska (Universitas Islam Kadiri). Doa bersama yang sebenarnya agak kaku ini lebih menunjukkan upaya kampanye perdamaian yang dipelopori para elit agama dengan melibatkan umat beragama secara massif, diikuti sekitar dua ribu orang,¹⁹ dibanding sebuah pengalaman *passing over* keagamaan. Meskipun diberi nama "doa bersama", pada praktiknya doa dilakukan sendiri-sendiri menurut

¹⁶ Jawa Pos, 30, 31 Agustus dan 2 September 1996. Artikel Agus Sunyoto antara lain mengungkapkan fakta-fakta konfrontatif antara kaum santri dengan PKI, BTI dan Lekra. Dia juga menyebut "Pengirim Zakat" sebagai salah satu dari "tujuh setan desa" sebuah slogan konfrontatif dari PKI. Tulisan yang heroik ini juga mengingatkan peristiwa konflik di Kediri dan sekitarnya, dari masalah *land reform* sampai kesenian. Sebuah kesenian yang disebut misalnya menyebutkan satu ludruk di Prambon, Nganjuk, yang diadakan PKI dengan judul "*gusti Allah dadi mantan*" (Gusti Allah menjadi pengantin).

¹⁷ Tri Chandra Ap, "Shalawat Badr: Puncak Radikalisme Catatan Awal Keterlibatan Banser dalam Tragedi Kemanusiaan Tahun 1965-1966", dalam Konferensi Sejarah Nasional Ke-VII, Jakarta 28-30 Oktober 2001, makalah tidak diterbitkan.

¹⁸ Ahmad Subakir, *Merajut Persaudaraan Sejati Antar Umat Beragama 5 Tahun PKUB Kota Kediri*, Kediri: Litbang PKUB Kota Kediri, 2003, hlm. 86.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 88.



agama dan aliran masing-masing dalam ruang yang berbeda dan terpisah. Sehingga sebenarnya kebersamaan yang dimaksud lebih menunjukkan kebersamaan “waktu”. Tetapi setidaknya acara ini sangat berhasil sebagai media transformasi platform bersama para elit agama, politik dan ekonomi yang telah terumuskan sebelumnya kepada massa yang lebih luas. Peristiwa ini juga menjadi tanda bahwa elit agama yang sekaligus menjadi elit kultural masih memiliki pengaruh yang luas di masyarakat.

Meskipun kiai Anwar Iskandar yang merupakan alumni Lirboyo dan beberapa pengurus NU dimana kiai Abdullah Kafabih Lirboyo menjadi Rais Syuriah-nya merupakan garda depan Paguyuban, tetapi pesantren Lirboyo secara institusi baru melibatkan diri di Paguyuban lebih dari satu tahun setelah Paguyuban dibentuk. Sebuah keputusan yang agak mengejutkan berlangsung ketika pesantren Lirboyo tiba-tiba ditempati acara “halal bi halal antar agama Paguyuban” tanggal 29 Januari 2000. Setahun berikutnya, 3 Pebruari 2001, acara yang sama juga diadakan kembali di pesantren Lirboyo. Kemudian tanggal 9 Pebruari 2001 di pesantren terbesar di Kediri ini juga berlangsung malam keakraban antar agama yang diprakarsai Paguyuban.²⁰

Pada titik inilah terdapat pergeseran identitas dan peran yang dimainkan oleh pesantren Lirboyo di masa lalu, 1965-1966, dengan perannya di era transisi Reformasi. Di masa lalu identitas agama diperuntukkan untuk pendorong kekerasan, dan kini, identitas agama menjadi bagian penting penyokong usaha-usaha perdamaian.

2. Integrasi dan Ruang Kerjasama

Selanjutnya menarik untuk menelusuri kapan dan bagaimana pergeseran tersebut berlangsung. Di bagian akhir bukunya, Sulistyو (2003) sudah mulai menangkap arah pergeseran peran sosial politik pesantren Lirboyo setelah peristiwa 1965-1966, khususnya tentang respons pesantren Lirboyo terhadap Pemilu 1971, dia menulis sebagaimana berikut ini:

”Di tempat-tempat konflik dan pembunuhan (yang) terjadi secara intens, khususnya di Jombang dan Kediri, para bekas aktor sudah kehabisan tenaga untuk menjalankan permainan lama. Mereka juga tidak tertarik lagi untuk terlibat dalam permainan politik yang baru (Pemilu 1971), karena prioritas mereka pada masalah ekonomi. ...Santri pesantren dari generasi yang lebih muda dipengaruhi oleh kiai mereka untuk lebih memusatkan tenaga pada tujuan yang paling pokok: pengajaran al-Quran. Lebih dari itu, banyak santri yang terlibat dalam konflik NU-PKI telah lulus. Kini bukan saat yang tepat untuk membuka konflik baru dengan terlibat aktif dalam pemilu. Kini saatnya untuk mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah...”²¹

Arah keberpihakan pesantren Lirboyo pada platform perdamaian dan “pembangunan” (*developmentalisme*) semakin jelas sekitar satu dekade setelah Pemilu 1971 tersebut. Keberpihakan ini pada saat yang bersamaan juga menunjukkan siapa partner penting bagi Lirboyo di tingkat lokal. Ketika Tjoa Ing Hwie, pendiri pabrik rokok Gudang Garam, meninggal dunia, kiai Mahrus Aly, salah satu pemimpin Lirboyo generasi kedua, mengungkapkan kesan-kesannya terhadap Tjoa Ing Hwie sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 114-118.

²¹ Hermawan Sulistyو, *Palu Arit di Ladang Tebu Sebuah Pembantaian Massal yang Terlupakan*, cet. Ketiga, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 228-229. Kata-kata dalam kurung berasal dari penulis untuk lebih menjelaskan maksudnya.



”...Karena dulu dia pernah melarat, dia sekarang jadi suka membantu orang. ...Kalau tidak ada Gudang Garam Kediri gelap dan tidak punya pamor. Ing Hwie seperti ingin membagi keuntungan yang diperolehnya bersama masyarakat...”²²

Ungkapan ”*kalau tidak ada Gudang Garam Kediri gelap dan tidak punya pamor*” menjadi penanda penting telah terbukanya ruang integrasi antara kiai Mahrus Aly sebagai kiai pondok terbesar di Kediri dengan Ing Hwie sebagai cukong rokok terbesar. Tidak ada informasi secara pasti relasi keduanya pada waktu itu. Biografi *Tiga Tokoh Lirboyo* hanya mencatat relasi kiai Mahrus Aly dengan pemimpin-pemimpin politik dan militer. Tetapi satu hal yang penting dicatat adalah pengakuan kiai Mahrus Aly sendiri bahwa Ing Hwie biasa memberikan komitmen sosial tanpa publisitas.²³ Artinya sejak awal kemungkinan telah terjadi hubungan yang dekat antara Lirboyo dan GG. Sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada saat bersamaan sebenarnya antara keduanya telah berkomunikasi untuk mengkonstruksi platform sosial bersama.

Kedekatan kiai Mahrus Aly dengan Ing Hwie semakin tampak misalnya ketika dia menghadiri pemakaman Ing Hwie di Desa Karangrejo, Kediri. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang kontroversial di Kediri saat itu. Sebab sejauh perkembangan diskursus *fiqh* (hukum Islam) yang berkembang saat itu menyebutkan ketidaklaziman seorang Muslim menghadiri pemakaman orang non-Muslim. Lebih dari itu ternyata kiai Mahrus Aly bersama sebagian santri Lirboyo membacakan *tahlil* selama 7 hari berturut-turut dan 40 hari pada peringatan meninggalnya Ing Hwie di masjid Gudang Garam unit 6.²⁴

Ing Hwie lahir di Fujian Cina pada tahun 1923 dan diajak beremigrasi keluarganya pertama kali ke Sampang, Madura, pada tahun 1926. Dia pindah ke Kediri untuk bekerja di perusahaan rokok milik pamannya, Tjoa Kok Tjiang, bernama ”Rokok Tjap 93”. Pada awal tahun 1961, Kediri telah menjadi penghasil rokok terbesar kedua setelah Kudus. Ing Hwie memisahkan diri dari perusahaan pamannya dan mulai merintis perusahaan rokoknya sendiri pada tahun 1956 dengan merk pertamanya, ”Inghwie”. Sejak 1958 dia mendaftarkan perusahaannya dengan bendera ”Pabrik Rokok Tjap Gudang Garam”.²⁵ Perusahaan ini mulai berkembang pesat setelah pada tahun 1979 ikut berkompetisi dalam persaingan SKM (Sigaret Kretek Mesin), menyusul dua perusahaan rokok lainnya yang telah mendahuluinya, Djarum dan Bentoel. Pada tahun 1968, pemerintah Orde Baru di bawah UU penanaman modal dalam negeri, memberikan lisensi mekanisasi hanya kepada empat perusahaan rokok nasional, selain Gudang Garam, kepada Djarum, Bentoel, dan Sampoerna.

Gudang Garam yang kini menjadi perusahaan terbesar di Kediri memiliki nilai penting tersendiri bagi masyarakat Kediri. Perusahaan rokok ini menentukan perekonomian di tingkat lokal. Gudang Garam mengambil porsi 68 % dari industri yang ada di Kota Kediri. Selain itu perusahaan ini juga memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masyarakat Kota Kediri sekitar Rp 15,594 triliun dari total PDRB Rp 19,727 triliun. Pada bulan Desember 2002 perusahaan ini mempekerjakan 15.344 karyawan tetap dan 25.675 karyawan tidak tetap.²⁶

Keberadaan Gudang Garam tidak hanya bermanfaat bagi pekerja-pekerjanya, tapi secara tidak langsung juga bagi elit-elit lokal yang lain. Bagi pesantren Lirboyo, Gudang Garam setidaknya menjadi dua arena pengelolaan kepentingan. Pertama kepentingan dakwah Islam dan kepentingan patner ekonomi.

²² Majalah Tempo, 7 September 1985, sebagaimana dikutip kembali dalam *Sie Hok Tjwan/ Netherland/ Indonesia Media* <http://www.indonesiamedia.com/rubrik/tokoh/tokoh00april.htm>

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Hasyim, Desember 2004.

²⁵ Mark Hanzus, *Kretek: the Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta-Singapore: Equinox Publishing, 2003, hlm. 148.

²⁶ Jumlah karyawan tersebut sesuai *Laporan keuangan Konsolidasi Tahun Terakhir 31 Desember 2002 dan 2001*, hlm. 10.



a. Dakwah Islam di sebuah Pabrik Rokok

Pada awalnya program Islamisasi atau menurut bahasa kaum santri lebih sering disebut “dakwah Islam” menemukan praktiknya karena dorongan kebutuhan GG untuk “menertibkan” karyawannya dengan “moral” yang berkembang pada umumnya di lingkungan sekitar. Seorang infoman yang pernah menjadi humas GG menceritakan hal demikian.

“...ketika awal mula dibangun asrama pegawai perempuan unit 6, sore sampai malam hari para pekerja perempuan banyak yang diapeli, diajak, atau dijemput pacarnya. Bahkan di pinggir-pinggir jalan banyak perempuan pekerja dan pacarnya berduaan. Suasana ini mengganggu perasaan umum masyarakat, termasuk para pimpinan GG. Mereka seperti pelacur saja. Untuk itu muncul ide untuk memberikan penerangan moral melalui dakwah keagamaan. Saat itu pula GG mulai menjalin kerjasama dengan pesantren, kiai-kiai dan ustadz-ustadz. Kemudian pada tahun 1983 di unit 6 dibangun masjid untuk pusat kegiatan dakwah Islam”²⁷

Program-program keagamaan GG antara lain berbentuk pengajian, belajar membaca al-Quran, peringatan hari-hari besar Islam, pengajian Ramadhan, pesantren kilat, safari keagamaan ke desa-desa dan ke pesantren-pesantren, penyantunan anak-anak yatim, memberikan sumbangan kepada para santri di pesantren-pesantren, dan lain sebagainya.²⁸ Pada umumnya pengajian yang diselenggarakan berisi ajaran ibadah praktis atau seruan-seruan moral.

Meskipun sejauh ini tidak ada respons negatif yang muncul ke permukaan dari buruh terhadap program dakwah, tapi beberapa bentuk dakwah kadang-kadang terkesan memaksakan diri. Misalnya sebuah fenomena baru bahwa ceramah agama diadakan di GG tanpa harus mengurangi jam kerja dan produktifitas kerja buruh. Sebuah media lokal menggambarkan sebuah ceramah agama di bulan Ramadhan tahun 2003 yang diselenggarakan di dalam pabrik, sementara para buruh tetap aktif bekerja.

Muballigh atau muballighah, langsung masuk ke ruang kerja para karyawan dan memberikan pengajian di sana. Tetapi, para karyawan GG tetap melakukan kerja seperti biasanya. Tidak ada yang terganggu sama sekali. Sementara, sang muballigh atau muballighah terus memberikan siraman rohani. Di luar dugaan, ternyata pengajian itu sama sekali tidak mengganggu kerja dan para karyawan tetap bisa mendengarkan isi pengajian itu. Tak ayal, meski mereka terlihat terus bekerja seperti biasanya, tetapi begitu ada joke-joke segar dari muballigh mereka langsung koor tertawa. Atau, jika ada sautan shalawat untuk ditirukan, ternyata mereka juga membaca salawat bersama-sama dengan tangan tetap bekerja melinting rokok.”²⁹

Ketika berlangsung demo-demo buruh di GG beberapa kali di era transisi reformasi, dakwah Islam menjadi bagian dari alat penundukan. Para kiai sering memberikan seruan melalui ceramah agama kepada para buruh untuk tidak ikut demonstrasi.³⁰

b. Gudang Garam dalam Muktamar NU di Lirboyo

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Mohammad Hasyim, Desember 2004.

²⁹ *Radar Kediri*, 13 Nopember 2003.

³⁰ Wawancara dengan Mohammad Hasyim, Desember 2004.



Pada bulan Nopember tahun 1999 NU menyelenggarakan Muktamar ke-30. Sejak jauh hari sebelumnya pesantren Lirboyo ditunjuk sebagai tuan rumah acara rutin terbesar lima tahunan organisasi ini. Sementara itu meskipun pesantren Lirboyo merupakan pesantren terbesar di Kediri, tapi pesantren ini memiliki banyak kekurangan fisik. Tanah pesantren di sekitar lingkungan tempat tinggal para kiai hampir penuh dimanfaatkan untuk ruang kelas dan kamar santri. Masjid yang terletak di muka pesantren induk (barat) juga merupakan masjid tua yang tidak terlalu luas. Kondisi ini menuntut Lirboyo berpikir keras mengatasi kekurangan fisiknya untuk sebuah Muktamar NU dimana kiai-kiai Lirboyo saat itu menjadi pengurus inti organisasi ini di tingkat lokal maupun pusat.

Biasanya Muktamar NU selalu ramai dan semarak. Di tempat ini akan datang pengurus pusat, wilayah dan cabang yang tersebar luas di mana-mana, termasuk beberapa pengurus cabang istimewa dari luar negeri. Keramaian mungkin tidak disebabkan oleh banyaknya pengurus, tapi malah kehadiran massa NU kultural (non-pengurus) yang bisa dipastikan mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Tetapi pada praktiknya sebenarnya Lirboyo juga tidak harus membuat persiapan berlebihan, sebab sebagian massa organisasi ini biasa istirahat dan tidur di pojok-pojok pondok, di masjid, atau tempat-tempat lainnya. Sehingga persiapan fisik yang utama yang harus dipersiapkan Lirboyo sebenarnya hanya beberapa hal seperti menyediakan lapangan yang cukup menampung ribuan massa; kamar-kamar untuk sebagian tamu istimewa; sebuah ruang atau aula dalam ukuran besar yang mampu menampung kebutuhan sidang-sidang; dan sebuah masjid yang lebih besar dari masjid yang sekarang ini ada.

Beberapa tahun sebelumnya, persiapan pembebasan (pembelian) tanah di lakukan oleh Lirboyo. Pesantren ini menyiapkan sebuah tanah sangat luas untuk pembangunan beberapa gedung Muktamar, terletak persis di sebelah selatan pondok induk. Seorang informan yang menjadi panitia lokal Muktamar tidak mengetahui secara pasti darimana dana-dana untuk proses pembebasan tanah ini.³¹ Setelah waktu sudah semakin dekat Lirboyo sudah mendesak untuk membangun dua gedung utama, yaitu Aula Muktamar dan Masjid. Kebutuhan dana untuk dua gedung ini termasuk kebutuhan yang besar.

Berikutnya dalam masalah ini kita bisa melihat bagaimana pola hubungan dan kerjasama antara dua elit lokal strategis ini berlangsung. Ketika waktu sudah semakin dekat dan ada beberapa kebutuhan utama yang belum tersedia, GG merasa terpanggil untuk membantu. Istilah “terpanggil” di sini muncul, sebagaimana nanti digunakan untuk mengungkapkan bahwa kiai “terpanggil” ikut menyelesaikan konflik buruh dan unjuk rasa di GG.³² Istilah “terpanggil” mewakili kondisi hubungan yang interdependen antara Lirboyo dan GG.

Pada praktiknya bukan kiai Lirboyo yang datang ke GG untuk meminta bantuan. Rachman Halim alias Tjoa To Hing (presiden komisaris GG) dan Rinto Harno (Direktur Pemberdayaan Usaha) *sowan* atau berkunjung ke rumah kiai Idris Marzuqi untuk menanyakan apa yang bisa dibantu oleh GG. Rachman Halim dikenal jarang sekali berhubungan langsung dengan para kiai, sehingga peristiwa kedatangannya ke Lirboyo mengindikasikan masalah tersebut sangat penting dan GG sungguh ingin membantu meringankan beban Lirboyo. Kemudian kiai Idris Marzuqi mengungkapkan ada dua gedung besar yang perlu dibangun, Aula Muktamar dan masjid. Selanjutnya Rachman Halim menyanggupi untuk membantu pembangunan aula Muktamar. Sementara di kemudian hari masjid berdiri atas bantuan seorang pengusaha lokal, H. Muchayat.³³ Informan yang penulis wawancarai tidak menyebutkan berapa jumlah dana yang sebenarnya habis untuk menyumbang Muktamar tersebut. Tapi dari bangunan “Aula Muktamar”, demikian pula gedung ini sekarang diberi nama, bisa dipastikan memakan biaya dalam hitungan milyaran rupiah. Sebagaimana telah disebut di atas, panitia lokal yang penulis wawancarai juga tidak tahu secara pasti,

³¹ Dia mengatakan panitia Muktamar hanya mengetahui anggaran (formal) Muktamar, bukan dana-dana yang dihasilkan melalui lobby kiai-kiai Lirboyo dengan pihak lain. Dia membedakan dua istilah antara dana panitia dan dana lobby (yang diusahakan secara informal oleh kiai). Wawancara dengan Ahmad Subakir, Desember 2004.

³² Dua informan utama yang penulis wawancarai, Rinto Harno dan Moch. Hasyim sama-sama menggunakan istilah ini ketika menjelaskan pola relasi yang interdependen antara GG dan Lirboyo.

³³ Wawancara dengan Moch. Hasyim, Desember 2004.



karena anggaran semacam ini tidak masuk dalam laporan panitia. Pada umumnya GG juga tidak pernah membuka kepada publik seberapa besar jumlah dana sosial yang disumbangkan GG kepada masyarakat lokal di Kediri, termasuk yang dikeluarkan untuk bekerjasama dengan para kiai. Dalam laporan tahunannya kepada publik tahun 2002 misalnya perusahaan ini terlihat sengaja menutupi jumlah sumbangan sosialnya. Dalam laporan tersebut ditulis beaya “sumbangan, jaminan tamu/ atensi relasi” disatukan dengan satuan beaya “pajak bumi dan bangunan” yang pada tahun 2001 membutuhkan dana sebesar Rp 21,09 milyar dan tahun tahun 2002 sebesar Rp 23, 25 milyar.³⁴

Sampai di sini kita menangkap kesan bahwa hubungan antara GG dengan kiai Lirboyo memang telah mapan dan berlangsung dalam waktu lama. Hubungan tersebut misalnya ditandai dengan model-model komunikasi yang telah “baku” dan keinginan keras untuk saling menjaga kepentingan satu dengan yang lainnya.

c. Kiai Membela Kapital: Harga sebuah Integrasi

Kalau dalam dua kasus di atas pesantren lebih bersifat memanfaatkan ruang integrasi dalam bekerjasama dengan Gudang Garam, dalam kasus ini kita akan mendapatkan gambaran bagaimana pesantren Lirboyo memberikan kontribusi untuk sebuah masalah pelik yang dihadapi oleh Gudang Garam, demonstrasi buruh. Karena keterbatasan ruang, disini tidak dipaparkan demonstrasi buruh tersebut secara kronologis. Kasus demonstrasi buruh yang dimaksud di sini adalah dua demonstrasi buruh, *pertama*, demonstrasi buruh Maret-April 2000, dan *kedua*, demonstrasi buruh bulan Mei 2002. Unjuk rasa buruh yang disebut pertama merupakan unjuk rasa terbesar yang melibatkan puluhan ribu buruh dan mengakibatkan perusahaan sampai sempat menutup pabrik secara resmi. Dua demonstrasi tersebut diprakarsai oleh Sarbumusi, sebuah sarekat buruh di bawah NU.

Para kiai memiliki peran penting dalam usaha penyelesaian konflik perusahaan dan buruh di Gudang Garam. Kiai Anwar Iskandar (pesantren Assa’adiyah, alumni Lirboyo) terlibat menjadi mediator pertemuan antara Sarbumusi dengan pihak manajemen GG tanggal 8 April 2000 dalam demonstrasi Maret-April 2000.³⁵ Sementara itu unjuk rasa bulan Mei 2002 berhenti juga setelah para kiai dan pemerintah lokal memberikan “pengarahan” kepada para demonstran di lapangan. Para kiai yang datang saat itu adalah kiai Idris Marzuqi (pesantren Lirboyo), kiai Zaenudin Djazuli (pesantren Ploso, alumni Lirboyo), kiai Anwar Iskandar (pesantren Assa’adiyah, alumni Lirboyo) dan kiai Imam Yahya Malik (pesantren al-Ma’ruf Kedonglo).³⁶ Keterlibatan kiai-kiai sebagai mediator perundingan antara buruh dengan perusahaan GG maupun terjun langsung ke lapangan untuk menghentikan demonstrasi adalah peristiwa yang menarik sekali dan tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Seorang informan menyebutkan selain kiai-kiai di atas ada beberapa kiai lain yang sebenarnya sangat dekat dengan GG, tetapi dia tidak ingat secara pasti apakah kiai-kiai ini semua juga ikut menghentikan aksi-aksi demonstrasi buruh GG. Mereka adalah kiai Zaimuddin Badrus Sholeh (pesantren Purwoasri), kiai Nurul Huda Djazuli (pesantren Ploso, alumni Lirboyo), kiai Najib (pesantren Mayan), kiai Imam Yahya Mahrus (pesantren Lirboyo), kiai An’im Falahuddin Mahrus (pesantren Lirboyo), dan kiai M. Anwar Manshur (pesantren Lirboyo).³⁷ Pada awalnya kiai Anwar Iskandar termasuk yang paling aktif, tetapi kemudian banyak kiai lain tertarik ikut dalam persoalan ini, termasuk kiai paling kharismatik di Kediri, kiai Idris Marzuqi Lirboyo. Rupa-rupanya pola seperti ini terjadi kembali dalam kasus ini sebagaimana kasus dalam Paguyuban antar agama sebagaimana pembahasan di muka.

³⁴ Laporan keuangan Konsolidasi Tahun Terakhir 31 Desember 2002 dan 2001, hlm. 39.

³⁵ Kompas, 12 April 2000.

³⁶ Kompas, 4 Juni 2002.

³⁷ Wawancara dengan Moch. Hasyim, Desember 2004.



Kiai Anwar Iskandar menceritakan rumahnya sering dijadikan pertemuan antara manajemen GG, pengurus Sarbumusi dan perwakilan buruh ketika di antara mereka terjadi konflik. Ruang tamu rumahnya yang cukup luas, dengan kursi-kursi yang berjajar panjang dan saling berhadapan, menjadi ajang perdebatan antar mereka dimana dia menjadi mediatornya.³⁸ Semula kiai Anwar Iskandar memposisikan dirinya sebagai mediator, tetapi secara mudah bisa dilihat orientasinya untuk memihak keputusan-keputusan perusahaan.

Seorang informan dari pihak GG memberikan penjelasan kerjasama antara GG dan para kiai sudah terjalin sangat lama, sehingga ketika terjadi masalah di GG para kiai “terpanggil” dengan sendirinya untuk datang membantu menyelesaikan. Pada praktiknya, biasanya beberapa pejabat GG datang kepada kiai dan menceritakan masalah yang sedang terjadi, tentunya tentang demonstrasi para buruh. Setelah mendengar cerita tersebut, para kiai pada umumnya langsung paham apa maksud kedatangan mereka. Tanpa harus dikatakan secara rinci para kiai kemudian paham apa yang mereka lakukan.³⁹

Seorang informan dari GG yang lain juga menceritakan hal yang sama. Para kiai pada umumnya tertarik dengan sendirinya melihat konflik GG dan buruh yang berlarut-larut, karena sudah dalam waktu yang lama hubungan GG dengan para kiai sangat dekat. Lebih lanjut dia menceritakan kalau para kiai merasa malu dan tidak enak dengan GG karena selama ini merekalah yang memberikan pembinaan rohani dan moral kepada para buruh GG. Kalau terus terjadi demonstrasi berarti pembinaan para kiai tidak berhasil atau gagal.⁴⁰ Sampai disini kita bisa melihat pertautan antara masalah ini dengan program-program Islamisasi atau dakwah di GG yang telah berjalan dalam waktu panjang. Dengan program dakwah tersebut para kiai sampai melihat harus menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap proses lancarnya perjalanan perusahaan.

Menurut penuturan seorang informan, pada praktiknya, ketika para kiai datang ke arena demonstrasi di lapangan, demonstrasi secara berangsur-angsur surut dan akhirnya bubar. Para demonstran banyak yang mengenal para kiai yang datang dan dalam tradisi yang berlaku para kiai di Kediri memiliki kharisma yang sangat tinggi. Tidak jarang para demonstran kemudian malah ada yang men-*salam*-i (berjabat tangan dengan mencium tangan) para kiai.⁴¹ Oleh karena itu belakangan ini manajemen GG sering melibatkan para kiai untuk menghentikan unjuk rasa buruh, disamping juga mendatangkan walikota dan pejabat pemerintah daerah yang lain. Dalam masalah ini, posisi para kiai sangat jelas terlihat sebagai pembela kapital.

Sarbumusi termasuk serikat buruh yang paling aktif memotori dua demonstrasi di atas. Sarbumusi memang datang di saat yang tepat, ketika euforia kebebasan mendapatkan angin segar di era reformasi. Meskipun menganggap Sarbumusi sebagai serikat buruh yang keras atau radikal, sepertinya pihak GG tidak bisa berbuat otoriter kepadanya. Hal ini sangat terkait dengan posisi Sarbumusi sendiri yang berada di bawah NU, organisasi para kiai lokal yang menjadi partner paling penting GG.

Selain posisi dilematis yang dihadapi oleh GG dalam mensikapi Sarbumusi, tapi rupa-rupanya Sarbumusi juga menghadapi masalah yang tidak kalah problematis. Apakah pengurus Sarbumusi akan memperjuangkan terus kepentingan buruh mati-matian, sementara di sisi lain secara institusi mereka juga berada di bawah patronnya, para kiai NU lokal, yang cenderung memihak kepentingan perusahaan GG.

Sarbumusi pertama kali didirikan oleh kiai-kiai NU di Sidoarjo tahun 1955. Dalam waktu lama di era Orde Baru, serikat buruh ini tidak aktif di mana-mana. Baru setelah Soeharto lengser NU merekomendasikan agar menghidupkan kembali Sarbumusi. Mukhtar NU tahun 1999 di Lirboyo

³⁸ Wawancara dengan kiai Anwar Iskandar, September 2003.

³⁹ Wawancara dengan Rinto Harno, April 2004. Rinto Harno, direksi GG yang paling dekat dengan para kiai, biasanya menjadi utusan GG kepada para kiai dalam hal ini.

⁴⁰ Wawancara dengan Moch. Hasyim, Desember 2004.

⁴¹ *Ibid.*



merekomendasikan kepada PBNU untuk mengambil langkah-langkah agar Sarbumusi dapat diaktifkan kembali di lingkungan warga NU.⁴² Tidak lama setelah itu pada tahun 2000 PBNU mengeluarkan surat instruksi kepada PWNU dan PCNU seluruh Indonesia yang berisi seruan untuk membentuk Sarbumusi di daerah masing-masing.⁴³ Belum ada klarifikasi secara pasti apakah Sarbumusi Kediri hidup kembali setelah Mukhtar atau telah lama sebelumnya. Kalau benar unjuk rasa di GG pada Maret-April 2000 sebagai unjuk rasa lokal yang pertama dipelopori Sarbumusi, berarti Sarbumusi mulai aktif setelah Mukhtar NU 1999. Satu hal yang bisa dipastikan bahwa Sarbumusi Kediri telah aktif sebelum keluarnya surat instruksi PBNU di atas, sebab surat itu baru dikeluarkan pada bulan Agustus 2000.

Menarik di sini melihat posisi Sarbumusi diantara buruh, GG, dan para kiai. Kalau antara GG dan para kiai bertemu dalam satu jalan kepentingan, dimana tempat Sarbumusi sebenarnya. Pada satu sisi Sarbumusi telah membuktikan mampu menggerakkan berbagai unjuk rasa yang membawa sedikit-banyak perbaikan bagi kaum buruh. Tetapi rupa-rupanya posisi kiai yang berada di belakang perusahaan ikut mampu mempengaruhi melunaknya Sarbumusi dalam beberapa kesempatan. Sebuah perundingan antara manajemen GG dengan perwakilan buruh dan Sarbumusi yang dihadiri ketuanya, Imam Mustofa, berlangsung dengan mediasi kiai Anwar Iskandar. Perundingan ini berjalan lancar,⁴⁴ biasanya berarti ada negosiasi yang banyak dimenangkan perusahaan. Unjuk rasa tiga hari berturut-turut bulan Mei 2002 berhenti setelah kiai Idris Marzuqi Lirboyo ikut turun ke lapangan dimana Sarbumusi kemudian mensepakai jalan perundingan yang diadakan tanggal 11 Juni 2002.⁴⁵

Meskipun Imam Mustofa sering mengatakan masih banyak tuntutan buruh yang belum dipenuhi oleh perusahaan,⁴⁶ tetapi rupa-rupanya radikalismenya dalam memprakarsai berbagai unjuk rasa berangsur-angsur menurun setelah keterlibatan kiai dalam konflik-konflik perburuhan di GG. Sampai di sini Sarbumusi memang terlihat ingin menjaga equilibrium posisinya diantara dua kepentingan yang saling kontradiktif, kepentingan buruh sebagai konstituennya; dan kepentingan kiai sebagai patron kultural dan patronnya secara kelembagaan.

4. Kesimpulan

Melalui kajian ini, kota Kediri telah menjadi salah satu studi kasus yang penting tentang hubungan antara agama dan modernitas di masyarakat Jawa modern. Kajian ini menunjukkan sebuah perkembangan atau pergeseran tentang peran agama di dalam modernitas di tingkat lokal.

Kediri di masa lalu menjadi arena polarisasi budaya dan politik yang mendalam yang kemudian membuatnya mungkin terjadi kekerasan massa terbesar dalam sejarah Kediri modern, pembunuhan massal 1965-1966, meskipun kekerasan tersebut memang tidak berdiri sendiri dan sangat rumit. Setelah itu di kota ini juga berlangsung beberapa kali kerusuhan anti Cina yang baru berhenti akhir tahun 1980. Sementara itu ketika belakangan ini berlangsung berbagai konflik dan kekerasan massa di banyak tempat mulai tahun 1996 dan baru berhenti pada awal tahun 2000-an, di kota ini tidak berlangsung konflik dan kekerasan massa yang berarti.

Dua institusi lokal yang menjadi studi kasus penelitian ini, Gudang Garam yang dalam beberapa perluasan sebagai elit ekonomi dan pesantren Lirboyo yang dalam beberapa perluasan sebagai elit kultural menunjukkan proses perjalanannya yang sangat menarik. Dalam perkembangannya GG tidak saja menjadi lokomotif ekonomi belaka, tapi sekaligus merumuskan peran sosial. Peran sosial yang dimainkan oleh GG

⁴² Rekomendasi Komisi Organisasi Mukhtar NU XXX di Kediri 25 Nopember 1999.

⁴³ Surat Instruksi PBNU No: 2910/A.II.03/VIII/2000 tanggal 5 Agustus 2000.

⁴⁴ *Kompas*, 12 April 2000.

⁴⁵ *Kompas*, 14 Juni 2002.

⁴⁶ *Ibid.*



tidak begitu saja diberikan, tapi dengan sebuah harapan adanya jaminan sosial tentang keamanan dan perdamaian. Di sisi lain pesantren Lirboyo setelah terlibat secara penuh dalam konflik 1965-1966 kemudian mencari orientasi baru yang bisa memperkokoh peran kulturalnya tanpa harus meninggalkan peran utamanya sebagai “pengkotbah” Islam. Rupa-rupanya pertemuan dan integrasi keduanya bermula dari proses ini.

Sebelum masa transisi reformasi kedua elit lokal tersebut telah menyediakan nilai kolektif tentang perdamaian sebagai titik pijak integrasi keduanya. Nilai kolektif ini penting sekali sebagai modalitas sosial untuk keluar dari konflik dan kekerasan yang banyak terjadi di mana-mana dewasa ini. Bagi hubungan keduanya nilai kolektif perdamaian mensyaratkan adanya integrasi kepentingan. Dalam konteks seperti itulah beberapa kooperasi antara GG dan Lirboyo bisa dipahami, misalnya Islamisasi di GG, keterlibatan para kiai untuk menghentikan unjuk rasa-unjuk rasa, dan donasi yang diberikan GG kepada pesantren Lirboyo dalam persiapan Muktamar NU.

Integrasi antara agama dan industri telah mendorong elit-elit agama merumuskan nilai kolektif baru yang berbeda dari nilai yang dijalankan sebelumnya. Sampai di sini kita bisa menarik pelajaran penting bahwa identitas agama tidak berdiri sendiri dan terpisah dari identitas-identitas yang lain. Perumusan tentang identitas agama sering dipengaruhi oleh identitas-identitas lain di sekitarnya. Memang berlebihan mengatakan bahwa kedua institusi di atas menjadi aktor tunggal yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kehidupan sosial yang mampu keluar dari konflik dan kekerasan massa. Namun keduanya telah menunjukkan pihak yang terlibat, atau bahkan menjadi *avan garde*, dari penciptaan nilai kolektif perdamaian dan mengelolanya dalam praktik-praktik sosial.

Bagi kelompok agama, perumusan identitas agama sebagai penyokongan sistem sosial yang lebih besar, kuat, dan mapan pada saat bersamaan memiliki konsekuensi perbenturan pada nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda di dalam kelompok agama itu sendiri. Benturan antara kelompok kiai yang menyokong kepentingan Gudang Garam dan Sarbumusi yang memperjuangkan kepentingan buruh di sisi lain merupakan contoh menarik perbenturan kepentingan dalam konstruksi sebuah identitas agama. Sehingga kajian ini menampilkan pergeseran identitas agama di masa lalu dan sekarang, serta konsekuensi pilihan tersebut bagi sebuah dinamika komunitas keagamaan.***

